

Jejak Oligarki Dalam Pengelolaan Tambangan Emas: Studi Kasus PT Freeport Indonesia Di Papua

¹Anggi Hawarnia, ²Yusmar Yusuf, ³Anggita Hikmatul Hiayah

^{1,2}Universitas Riau

³Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Korespondensi : yusmaryusuf@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Sejak beroperasi pada tahun 1967, PT Freeport telah menjadi salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, menghasilkan emas dan tembaga dari salah satu deposit terbesar di Grasberg. Meskipun perusahaan ini mengklaim memberikan kontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), terdapat ketimpangan signifikan antara keuntungan yang diperoleh dan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara kepemilikan saham, perpanjangan izin operasi, dan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan mereka yang terancam oleh limbah tailing. Temuan menunjukkan bahwa oligarki berperan penting dalam menentukan kebijakan pertambangan yang sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, sehingga menciptakan ketidakadilan sosial dan lingkungan di Papua.

Kata kunci : Oligarki, Pembangunan, Freeport

Abstract

Since its operation began in 1967, PT Freeport has become one of the largest mining companies in the world, extracting gold and copper from the massive Grasberg deposit. Although the company claims to contribute through its Corporate Social Responsibility (CSR) programs, there remains a significant disparity between the profits generated and the socio-economic conditions of local communities. This research explores the relationship between share ownership, the extension of operational permits, and the environmental impacts of mining activities. The study employs a qualitative methodology, with a literature review as the primary approach. It highlights the challenges faced by indigenous communities in protecting their rights to land and preserving their environment, which are increasingly threatened by tailing waste. The findings indicate that oligarchy plays a crucial role in shaping mining policies that often neglect the interests of local communities, resulting in social and environmental injustices in Papua.

Keyword: Oligarchy development, Freeport.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kaya akan sumber daya alam, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah industri pertambangan, khususnya tambang emas. PT Freeport Indonesia, yang beroperasi di Papua sejak tahun 1967, menjadi salah satu contoh utama bagaimana oligarki dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam di negara ini. Dengan statusnya sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, Freeport tidak hanya berperan penting dalam perekonomian nasional, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, menunjukkan hubungan erat antara perusahaan dan pemerintah. Mayoritas

saham PT Freeport kini dikuasai oleh Mining Industry Indonesia (MIND ID), perusahaan milik negara, dengan sisa saham dikuasai oleh Freeport-McMoRan Inc. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepentingan masyarakat Papua diperhatikan dalam kebijakan yang diambil. Masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam mereka, meskipun mereka adalah pihak yang paling terkena dampak dari aktivitas pertambangan. Dampak lingkungan dari operasi Freeport juga menjadi sorotan. Limbah tailing yang dihasilkan telah mengakibatkan pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem pesisir, yang mengancam kehidupan masyarakat nelayan lokal. Selain itu, laporan mengenai hilangnya pulau-pulau kecil akibat aktivitas tambang menunjukkan konsekuensi jangka panjang yang serius bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi jejak oligarki dalam pengelolaan tambang emas PT Freeport Indonesia di Papua dengan menganalisis struktur kepemilikan, kebijakan pemerintah, serta dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat lokal dan pentingnya keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam demi mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau studi kepustakaan untuk mengeksplorasi jejak oligarki dalam pengelolaan tambang emas oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang diteliti menggunakan database artikel penelitian yang relevan melalui Google Scholar, SINTA, Scopus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran artikel atau jurnal yang berfokus pada topik, jejak oligarki dalam pengelolaan tambangan emas studi kasus Pt Freeport Indonesia di Papua dengan detail disajikan dalam tabel 1 dibawa ini:

Tabel 1. Data Artkel Terpilih

No	Judul	Penulis, tahun	Tujuan	Hasil
1	Analysis of Land Disputes Between PT Freeport Indonesia, the Indonesian Government and the Papuan Community	Achmad Muflihuts Tsaqif , Leonard Roderick Situmorang , Zalfa Rajabi, Dwi Desi Yayi Tarina, Juli 2024	Kompleksitas operasi Freeport, dan tantangan dalam menemukan resolusi yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan dan hak-hak masyarakat. Analisis peran Pemerintah Indonesia sebagai mediator dan regulator. Serta memberikan wawasan dan rekomendasi yang adil dan penyelesaian berkelanjutan terhadap	Sengketa lahan antara PT Freeport Indonesia, diakibatkan faktor utamanya yakni konflik kepemilikan tanah dan hak adat, dampak lingkungan yang signifikan dari kegiatan pertambangan, ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Papua, serta konflik budaya dan sosial akibat keberadaan Freeport di wilayah mereka. Upaya yang harus dilakukan, yakni revisi regulasi dan kebijakan terkait pertambangan, kepemilikan lahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

			sengketa pertanahan yang rumit.	lokal, melalui program pengembangan keterampilan, kesempatan kerja, dan investasi di Papua.
2	The Existence Of Pt. Freeport Indonesia: Effects For Indigenous Peoples And The Investment Climate in papua	Herry Mart Polontoh, Tri Yanuaria, Tahun 2023	Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keberadaan PT Freeport Indonesia dan Dampak Indonesia terhadap adat istiadat sosial masyarakat setempat, khususnya suku Amungme dan Komoro, serta iklim investasi di Papua. Untuk	Temuan kajian menunjukkan bahwa masyarakat setempat terdampak oleh lingkungan fisik, meliputi timbunan tailing (limbah industri pertambangan) dan pengambilan tanah ulayat di luar batas wilayah yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Januari 1974
3	Bending The Golden Giant: Indonesia's Bargaining Power for Nationalized Control Over PT. Freeport Indonesia	Atep Abdurofiq, Indra Kusumawardhana, September 2024	Untuk proses renegotiasi antara Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam mengendalikan sumber daya alam (tambang) Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak mempunyai daya tawar. Daya tawar Pemerintah Indonesia dapat dilihat dari model tawar menawar yang sudah usang dan politis, meliputi (1) Penyediaan akses terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja lokal, (2) Insentif berupa pelarangan ekspor konsentrat, dan (3) Pandangan bahwa renegotiasi ini mutlak bagi Pemerintah Indonesia dan tidak ada alternatif kebijakan lain. Sedangkan PT Freeport Indonesia sebagai perwakilan Freeport McMoRan mempunyai daya tawar, yaitu (1) Penguasaan teknologi, (2) Kekuatan Permodalan, (3) Kontribusi terhadap Pemerintah Indonesia, dan (4) akses untuk melobi Pemerintah Amerika Serikat untuk menekan Pemerintah Indonesia. (5) Memiliki alternatif tindakan dengan mengajukan gugatan melalui arbitrase internasional.
4	Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu	Barsihanor, Sobirin, Putri Hergianasari, April 2023	Mengungkap keterlibatan oligarki dalam pengelolaan pertambangan batubara, juga menganalisis hubungan antara hubungan bisnis dan politik sebagai kaitannya dengan patronase yang berdampak pada dinamika ekonomi-politik sebuah	Hasil studi menunjukkan bahwa banyak perusahaan tambang batubara tidak hanya beroperasi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga telah terlibat dalam arena politik kekuasaan.

			Kabupaten Tanah Bumbu, di Kalimantan Selatan	
5	Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo	Sholahudin Al Ayubi, Riaty Raffiudin. Juli 2023	Memahami bagaimana pengaruh dominasi oligarki pada pengelolaan SDA di sektor industri ekstraktif batu bara selama masa pemerintahan Jokowi.	Pada masa pemerintahan Jokowi, hubungan bisnis yang erat antara oligarki batu bara dan elit politik telah menyebabkan Indonesia terjebak dalam ketergantungan yang sangat tinggi terhadap industri batu bara, yang oleh para ahli menyebutnya sebagai rezim ekstraktivisme. Dampak negatifnya adalah memungkinkan terjadinya peningkatan korupsi politik, yang dapat berujung pembajakan negara.
6	Kemunduran Demokrasi Tata Kelola Sda: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society	Dini Suryani, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi'i, Pandu Yuhsina Adaba, Septi Satriani, tahun 2022	Menginvestigasi penurunan kualitas demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan menganalisis hubungan antara penguatan politik oligarki dan penyempitan ruang demokrasi bagi masyarakat sipil.	Penyempitan ruang partisipasi masyarakat sipil mengakibatkan pengendalian mereka terhadap kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi semakin lemah. Akibat dari memburuknya demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang mengecualikan masyarakat sipil adalah meningkatnya intensitas konflik agraria dan kerusakan lingkungan
7	Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki	Yusri Yusri, Jenda Ingan Mahuli	Menganalisis dan mengali informasi mengenai konsekuensi hukum dan negara jika berada di bawah kendali oligarki.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa oligarki memiliki dampak sebagai berikut: 1) Menghapus hak partisipasi warga negara, dan 2) Mengancam kesejahteraan masyarakat.
8	Dominasi Oligarki dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta	Luthfi Hasanah Bolqiah, Riaty Raffiuddin Tahun 2021	Menganalisis oligarki dan ancaman yang dihadapinya dalam satu kasus yang sama, yaitu pembangunan Reklamasi Pantai Jakarta, dengan menggunakan kerangka teori dari Winters (2011).	Hasilnya adalah dominasi oligarki bermula dari pembangunan Reklamasi Pantai Pantura sejak era presiden Soeharto. Selama masa reformasi, oligarki menjalin hubungan dengan kepala daerah Gubernur DKI Jakarta, untuk mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, terdapat juga oligarki yang berperan pada masa reformasi dengan mengambil alih perusahaan yang sebelumnya telah mendapatkan izin pembangunan.
9	Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis	Lailiy Muthmainnah Rizal Mustansyir Sindung	Untuk menganalisis secara kritis masalah pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dalam konteks krisis ekologi global serta	Pola pengelolaan lingkungan yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini masih terperangkap dalam tuntutan pertumbuhan ekonomi, disebabkan oleh dominasi korporasi dan oligarki

	atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia	Tjahyadi, tahun 2020	dampaknya terhadap isu keadilan antar generasi.	yang sangat kuat dalam penguasaan berbagai sumber daya alam yang ada di negara ini..
10	Developmental isme Gaya Baru Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terpasung	Shohebul Umam, 2022	Untuk mengeksplorasi lebih dalam konsep pembangunanisme yang diambil dari pemikiran Barat, meskipun telah banyak dikritik dan mulai ditinggalkan oleh negara-negara maju, tetap saja hal ini menjadi sebuah prinsip yang kuat bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, seiring berjalannya waktu di bawah berbagai rezim kekuasaan di Indonesia, developmentalisme selalu menjadi kerangka utama yang membentuk kebijakan sosial. Akibatnya, pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang, sementara masyarakat kecil justru menanggung dampak negatif dari proses pembangunan tersebut.
11	Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger	Elva Imeldatur Rohmah, tahun 2023	Menganalisis perubahan paradigma politik di Indonesia, melalui telaah pemikiran W.A Bonger	Hasil penelitian menunjukkan bahwa W.A. Bonger membedakan demokrasi menjadi dua kategori, yaitu formal dan material. Demokrasi formal merujuk pada kesetaraan politik, sedangkan demokrasi material berkaitan dengan kesetaraan ekonomi dalam masyarakat.

Dari hasil temuan artikel-artikel diatas, didapatkan pembahasan sebagai berikut:

Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Ketidakadilan sosial dan ekonomi menjadi isu sentral dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun PT Freeport mengklaim bahwa mereka berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), kenyataannya, kontribusi tersebut sering kali tidak sebanding dengan keuntungan besar yang diperoleh perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak program CSR yang lebih bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini menciptakan kesenjangan yang mencolok antara kekayaan yang dihasilkan oleh perusahaan dan kondisi hidup masyarakat lokal yang tetap miskin. Akibatnya, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap perusahaan semakin meningkat, memperburuk hubungan antara PT Freeport dan masyarakat adat.

Dampak Lingkungan

Aktivitas pertambangan PT Freeport telah menyebabkan dampak lingkungan yang sangat serius. Limbah tailing yang dihasilkan dari proses penambangan tidak hanya mencemari sungai-sungai di sekitar lokasi tambang, tetapi juga merusak ekosistem pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat nelayan lokal. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada kualitas air dan tanah, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup spesies ikan dan hewan lainnya yang bergantung pada ekosistem tersebut. Selain

itu, hilangnya pulau-pulau kecil akibat aktivitas tambang menunjukkan konsekuensi jangka panjang yang dapat merugikan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini menekankan bahwa dampak lingkungan dari operasi tambang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal, menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diputus.

Keterkaitan antara Oligarki dan Kebijakan

Keterkaitan antara oligarki dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam sangat kuat. Penguasaan saham oleh oligarki serta hubungan erat antara PT Freeport dan pemerintah mempengaruhi kebijakan yang diambil terkait izin operasi dan pengelolaan sumber daya. Perpanjangan izin operasi selama 20 tahun menunjukkan bahwa kepentingan oligarki sering kali diutamakan dibandingkan kepentingan masyarakat lokal. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam menjaga keadilan sosial dan lingkungan, karena keputusan yang diambil cenderung mengabaikan suara dan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan agar kepentingan masyarakat lokal dapat diperhatikan secara lebih baik.

Keterlibatan Masyarakat Lokal

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan faktor kunci untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan yang diambil cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam mereka sendiri. Dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif, tidak hanya hak-hak mereka dapat dilindungi, tetapi juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sumber daya alam serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan komunitas lokal. Ini akan membantu menciptakan model pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa oligarki memiliki pengaruh signifikan dalam pengelolaan tambang emas di Papua melalui PT Freeport Indonesia, dengan implikasi serius bagi keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama masyarakat lokal yang paling terdampak.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa oligarki memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan tambang emas di Papua, khususnya melalui PT Freeport Indonesia. Meskipun perusahaan ini mengklaim memberikan kontribusi positif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), kenyataannya terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dan kondisi masyarakat lokal. Masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, yang mengakibatkan kesenjangan yang mendalam dalam kesejahteraan. Dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan juga sangat signifikan, dengan pencemaran sungai akibat limbah tailing dan kerusakan ekosistem pesisir yang mengancam kehidupan masyarakat nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari operasi tambang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Keterkaitan antara oligarki dan kebijakan pemerintah terlihat jelas melalui penguasaan saham dan hubungan erat antara PT Freeport dan pemerintah. Perpanjangan izin operasi selama 20 tahun mencerminkan prioritas kepentingan oligarki di atas kepentingan masyarakat lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan transparan, serta peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak, terutama masyarakat adat yang paling terdampak.

5. SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan diatas berikut saran-saran yang diberikan, pertama reformasi kebijakan yakni, melakukan revisi regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat, tingkatkan program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal agar mereka dapat memperoleh manfaat langsung dari keberadaan perusahaan tambang. Libatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan hak dan kebutuhan mereka diperhatikan. Kemudian CSR yang berkelanjutan, dengan mendesain ulang program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Freeport agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat lokal dan memberikan dampak positif yang signifikan. Terakhir, pengawasan terhadap lingkungan, tingkatkan pengawasan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan untuk melindungi ekosistem dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurofiq, A., & Kusumawardhana, I. (2024). Bending The Golden Giant: Indonesia's Bargaining Power for Nationalized Control Over PT. Freeport Indonesia. *Journal of Governance*, 9(3), 545-566.
- [2] Al Ayubi, S., & Raffiudin, R. (2023). Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2533-2546.
- [3] As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1-17.
- [4] Bangun, N. B., & Rinanda, T. (2022). Pengaruh Oligarki Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 338-346.
- [5] Bolqiah, L. H., & Raffiuddin, R. (2021). Dominasi Oligarki dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 13-25.
- [6] Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14-28.
- [7] Hasanudin, H., Triyani, D., Yogaswara, R., & Suwangsih, N. (2023). Oligarki Dan Kekuasaan Oligarki Politik: Pertemuan Kepentingan Bisnis Dan Kepentingan Politik Di Kota Banjar Jawa Barat. *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 97-103.
- [8] Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 57-69.

-
- [9] Polontoh, H. M., & Yanuaria, T. (2023). The Existence of PT. Freeport Indonesia: Effects for Indigenous Peoples and the Investment Climate in Papua. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e1039-e1039.
- [10] Rohmah, E. (2024). Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki. *Dentika: Dental Journal*, 16(1), 01-12.
- [11] Saputra, T., Darmawan, A., & Novaria, R. (2021). Networks in the implementation of illegal gold mining countermeasure policy in Kuantan Singingi Regency. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 335-350.
- [12] Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2022). Kemunduran demokrasi tata kelola SDA: Penguatan oligarki dan pelemahan partisipasi civil society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173-190.
- [13] Tsaqif, A. M., Situmorang, L. R., Rajabi, Z., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analysis of land disputes between PT Freeport Indonesia, the Indonesian government, and the Papuan community. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 8(3), 1576–1582.
- [14] Umam, S. (2022). Developmentalisme Gaya Baru Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terpasung. *POPULIKA*, 10(2), 11-21.
- [15] Wijaya, H. (2021). Evolusi Oligarki di Indonesia. Wijayanto, AP Budiatri, & HP Wiratraman, *Demokrasi tanpa Demos: Refleksi*, 100, 822-830.
- [16] Yusri, Y., & Mahuli, J. I. (2023). Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 78-84.